

Hasil Audit BPK di Kejagung

HASIL audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT terkait kerugian negara atas pengelolaan dan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) di Bagian Kesra Setda Sikka tahun anggaran 2010 senilai Rp 10,7 miliar sudah berada di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hasil audit kerugian negara itu diperlukan Kejagung untuk kelengkapan berkas tersangka mantan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Sikka, Servas Kabu, dan mantan bendahara, Yoseph Ottu.

Kepala Seksi Penyuluhan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, Jemmy N Tirayudi, S.H, mengatakan hal itu saat dikonfirmasi terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos Sikka di ruang kerjanya, Rabu (18/7/2012).

Jemmy mengatakan, Kejati NTT sudah mendapat tembusan surat penyerahan hasil audit



POS KUPANG/MUHLIS AL ALAWI

Jemmy N Tirayudi

kerugian negara kasus tersebut di Kejagung RI.

Ditanya jumlah kerugian negara dalam kasus itu, Jemmy mengaku belum mengetahuinya. Peralnya, Kejati NTT hanya mendapat surat tembusan berisi hasil audit kerugian negara sudah diserahkan BPK RI Perwakilan NTT kepada Kejagung RI. Menurut dia, prosedur penyerahan hasil audit kerugian negara dalam kasus korupsi yang dilakukan BPK harus melalui Kejagung RI.

Dengan demikian, lanjut Jemmy, bila hasil audit sudah ditangan penyidik akan diketahui secara rinci kerugian negara dalam kasus tersebut.

Jemmy menambahkan, bila hasil audit kerugian negara di tangan penyidik Kejati NTT, berkas dua tersangka segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.

Mengenai penambahan jumlah tersangka, Jemmy mengatakan, sampai saat ini penyidik Kejati NTT baru menetapkan dua tersangka. Soal bertambah tidaknya tersangka akan dilihat dalam fakta persidangan nanti.

Diberitakan sebelumnya, Kejati NTT hingga kini belum melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi dana bansos Sikka. Penyidik juga masih menunggu hasil audit atau perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT. (aly)

Media : POS KUPANG

Edisi : KAMIS, 19 JULI 2012

Hal : 6